



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

REKAPITULASI HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019

NO	PARPOL	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	BASIS ADANYA KETIDAK PATUHAN	KESIMPULAN
1	PKB	BTFD(BENNY,TONY,FRANS & DANIEL) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS,MANAGEMENT AND TAX CONSULTANTS JL.nuri No.28 Makassar 90121, Indonesia phone: (0411)872435,851705;fax : (0411)857102;E-mail : btfdmakassar@gmail.com license no: 247/KM.1/2011	NIHIL	Asersi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye
2	GERINDRA	HBS (HABIS BASUNI & HERYADI) galaxi bumi permai blok G6/18 surabaya-60119 phone : 031.599 6181 fax : 031.596 6532 http:www.kaphbs.co.id email : admin@kaphbs.co.id JL. Sunan drajad no.2B pulo gadung jakarta timur-13220 phone : 021.4786 3331 http:www.kaphbs.co.id email : admin@kaphbs.co.id	NIHIL	Asersi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018

NO	PARPOL	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	BASIS ADANYA KETIDAK PATUHAN	KESIMPULAN
3	PDIP	HSR(honour, satisfaction, reliable) heru satria rukmana perumahan bukit waringin blok A no. 7 - 8 bojong gede 16320, bogor telp: +62 21 87970090 fax : +62 21 87970090 Kap_hsr@yahoo.com	Pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material terhadap peraturan perundang-Undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi DPC Kab. Pangkep Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama periode 20 Februari sampai dengan 25 April 2019, antara lain DPC Kab. Pangkep PDIP tidak mematuhi ketentuan mengenai Periode Pembukuan LADK	Asersi DPC Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU no.24 tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU no. 29 tahun 2018 dan PKPU no. 34 tahun 2018
4	GOLKAR	HWP(DRS.HARLY WEKU & PRICILLIA)REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANS, MANAGEMENT CONSULTANS JL.bontosua kompleks ruko dewi no. 1D makassar, telp : (0411) 3613129-3611688 fax. (0411)3624229 email : kaphw@indosat.net.id-kaphw@yahoo.com	NIHIL	Asersi Partai Golongan Karya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.24 tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313)
5	NASDEM	DBSD&A(DOLI, BAMBANG, SULISTİYANTO, DADANG & ALI) registered public accountans license no : 42/KM.1/2013 head office : menara kuningan 11 th floor jl. HR.rasuna said blok X /7kav.5, jakarta 12940 branch office: jl. Danau jempang B3 no. 29,pejompongan-jakarta 10210 workshop : graha mandiri (d/h bumi daya plaza) 14 th floor jl. imam bonjol no. 61, jakarta 10310 phone : (62/21)3103768, fax : (62-21) 3103230 email : admigraha@kapdbsda.co.id	NIHIL	Asersi Partai Nasdem Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 34 Tahun 2018

NO	PARPOL	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	BASIS ADANYA KETIDAK PATUHAN	KESIMPULAN
6	GARUDA	DRS.THOMAS,BLASIUS WIDARTOYO & REKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) CABANG MAKASSAR partners : alexander mangande, AK.,CA., CPA blasius mangande, AK., CA., CPA maruli tua tampubolon, SE., AK., CA., CPA Totok hariono,AK., CA., CPA thomas aquino tody, AK., CA., CPA widartoyo, AK., CA., CPA	pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) DPC Kabupaten Pangkajene Kepulauan selama periode 20 Februari 2018 s/d 25 April 2019, antara lain : 1. pengeluaran biaya administrasi bank pada RKDK tidak tercatat pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK 2-parpol) dan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye (LPPDK 5-parpol).	Asersi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) DPC Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU NO.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018
7	BERKARYA	KANTOR AKUNTAN PUBLIK " MASNAWATY SANGKALA, SE.,M.SI.,PH.D.,AK.,CA.,CPA" registered public accountants tax and managements consultants	pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Berkarya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 20 Februari 2018 s/d 25 April 2019, antara lain : 1. Asersi Nomor 1 (satu) dimana RKDK dibuka hanya 1 (satu) orang perwakilan, yang semestinya oleh 2 (dua) orang perwakilan. 2. Asersi nomor 5 (lima) dimana tidak melampirkan LADK1 - PARPOL yang berisi tentang RKDK, saldo awal, sumber pembengkuan, saldo akhir, dan NPWP. 3. asersi nomor 18 (delapan belas) dimana transaksi pengeluaran tidak semuanya dimasukkan kedalam daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye.	Asersi Partai Berkarya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Dana Kampanye

NO	PARPOL	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	BASIS ADANYA KETIDAK PATUHAN	KESIMPULAN
8	PKS	I. KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS.SUPRIADI LAUPE NO. IZIN : KEP-4994/KM.5/2004 JL. Dewi sartika no. 84C palu 94121 telp. (0451) 4013778, fax. (0451) 481385	pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 20 februari 2018 sampai 25 april 2019 antara lain : 1.laporan awal dana kampanye (LADK) tidak memuat informasi terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik peserta Pemilu; 2. terdapat penerimaan dana kampanye yang berasal dari calon anggota DPRD dalam bentuk tunai sebesar Rp. 16.100.000 yang tidak ditempatkan dalam rekening khusus dana kampanye; 3. seluruh pengeluaran dana kampanye sebesar Rp. 33.400.000 yang tidak didukung bukti-bukti transaksi yang memadai serta tidak tercatat dalam rekening khusus dana kampanye.	asersi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
9	PERINDO	IM KANTOR AKUNTAN PUBLIK IRSAD MUHAMMAD IZIN KEMENKEU NO. 615/KM.1/2018	NIHIL	Asersi DPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Partai Persatuan Indonesia dalam laporan dana kampanye , dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU no.24 tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 29 tahun 2018 dan PKPU no. 34 tahun 2018
10	PPP	AM AINUL MAKSU KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS)	Pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 20 februari 2018 sampai dengan 25 april 2019, antara lain : 1. bukti pengeluaran tidak lengkap, 2. LPPDK dan LPSDK caleg tidak lengkap. 3. penerimaan dana kampanye caleg tidak melalui RKDK. 4. tidak ada pengakuan jasa kampanye caleg.	Asersi partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan KPU 34 tahun 2018 tentang dana kampanye tentang pemilihan

NO	PARPOL	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	BASIS ADANYA KETIDAK PATUHAN	KESIMPULAN
11	PSI	SMT (SAHAT MT & REKAN REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS wisma sarina 3rd floor jalan majapahit no. 8 jakarta 10160, indonesia Telp : +62 (21) 345 2285 Fax : +62 (21) 345 2285 E-mail : info@sahatmt.co.id.www.sahatmt.co.id	Pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Solidaritas Indonesia selama periode 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain : 1. Partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan LPPDK1-Parpol yaitu asersi atas laporan dana kampanye partai politik calon peserta pemilu; 2. Partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan LPPDK2-Parpol, yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; 3. Partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan LPPDK3-parpol, yaitu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; 4. Partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan LPPDK4-Parpol, yaitu daftar penerimaan sumbangan dana kampanye; 5. Partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan LPPDK5-Parpol, yaitu daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye; 6. Partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan LPPDK6-Parpol, yaitu daftar saldo dana kampanye; dan 7. Partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan LPPDK-parpol, yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.	laporan dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018
12	PAN	BL BUNTARAN & LISAWATI Registered public accountants KANTOR AKUNTAN PUBLIK NOMOR IZIN USAHA 885/KM.1/2012	Pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Amanat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain : 1. tidak diperolehnya surat representasi dari peserta pemilu. 2. sumbangan Rp. 850.000,- a.n. caleg Abd. Haris tidak masuk LPSDK 3 sumbangan atas nama Jefry Bahtiar dan H. Amiruddin, S.Sos tidak sesuai bukti pendukung dan pengeluaran tidak melalui RKDK	Asersi Partai Amanat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah disesuaikan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan KPU 34 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

NO	PARPOL	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	BASIS ADANYA KETIDAK PATUHAN	KESIMPULAN
13	HANURA	GWA GRISELDA, WISNU & ARUM REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS	Pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Pangkep selama periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019, karena tidak mematuhi penyusunan LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, yakni terjadi ketidaksesuaian jumlah penerimaan antara LPSDK1-Parpol, LPSDK2-Parpol dengan LPSDK4-Parpol.	Asersi Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Pangkep dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam PKPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umum, PKPU Nomor 29 tahun 2018 perubahan pertama PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
14	DEMOKRAT	YDA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANISWAR & REKAN REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS IZIN MENKEU.RI.NO.44/KM.1/2018	NIHIL	Asersi DPC Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Partai Demokrat dalam laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No. 24 tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan PKPU no. 34 Tahun 2018